



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)**

**BIRO ADMINISTRASI KESRA DAN  
KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2018**

**PALANGKA RAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia dan hidayahNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 ) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan salah satu kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD dan LKPJ dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun kepada masyarakat. Demikian LPPD ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan dimasa yang akan datang.

Palangka Raya,     Februari 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN  
RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**H. SYAHRUDIN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601223 198503 1 011

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. DASAR HUKUM .....	1
B. GAMBARAN UMUM.....	4
1. Kondisi Sumber Daya Aparatur.....	4
2. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	7
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....	8
A. VISI DAN MISI .....	8
B. TUJUAN DAN SARAN.....	9
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	12
A. TARGET DAN REALISASI BELANJA.....	12
1. Belanja Langsung .....	12
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	15
A. URUSAN WAJIB BIRO KESRA.....	15
1. LAPORAN KINERJA .....	15
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	18
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	18
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.....	18
C. DANA DEKONSENTRASI.....	18
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	19
A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH.....	19
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.....	19
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....	19
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.....	20
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	20
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.....	20
G. PENYELENGGARAAN KAWASAN KHUSUS.....	20
BAB VII PENUTUP .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2018 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat stakeholders yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Agar prinsip *Good Governance* dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan LPPD Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018, berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1622);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**A. GAMBARAN UMUM****1. Kondisi Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0	0	0	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8	8	16	*)
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0	
4	Diploma Tiga (D-3)	1	0	1	
5	Sarjana (S-1)	13	12	25	*)
6	Sarjana (S-2)	3	0	3	
7	Sarjana (S-3)	0	0	0	
	Jumlah	25	20	45	

Keterangan: \*) termasuk Pegawai kontrak berjumlah 12 orang terdiri 7 orang Laki-laki dan 5 orang perempuan.

Dari jumlah pegawai sebanyak 45 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Pangkat golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan IV/c dengan jabatan Pembina Utama Muda sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		<b>L</b>	<b>P</b>		
1	I/d Juru Tingkat I	0	0	0	
2	II/a Pengatur Muda	7	5	12	*)
3	II/a Pengatur Muda	0	0	0	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I	3	1	4	
5	II/c Pengatur	2	3	5	
6	II/d Pengatur Tk. I	1	0	1	
7	III/a Penata Muda	2	0	2	
8	III/b Penata Muda Tk.I	3	5	8	
9	III/c Penata	0	3	3	
10	III/d Penata Tk. I	2	5	7	
11	IV/a Pembina	0	0	0	
12	IV/b Pembina Tk. I	3	0	3	
13	IV/c Pembina Utama Muda	1	0	1	
14	IV/c Pembina Utama Madya	0	0	0	
15	IV/e Pembina Utama	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	



Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Seperti kita lihat di tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II.b	1	0	1
3	Eselon III.a	3	0	3
4	Eselon IV.a	2	7	9
5	Fungsional	0	0	0
6	Non Struktural / Fungsional	18	14	32
	Jumlah	24	21	45

- Struktur jabatan yang terisi sampai dengan Desember 2018 sebanyak 13 jabatan dan telah terisi 13 orang, sesuai dengan Permendagri No. 41 Tahun 2007.
- Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sampai dengan Desember 2018 sebanyak 13 pejabat dari 13 pejabat yang ada.
- Anggaran yang digunakan (realisasi) untuk Belanja pegawai tahun 2018 berjumlah Rp. 1.817.856.000,-

## **2. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang tersedia berasal dari APBD. Jumlah nilai aset yang dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sampai dengan akhir tahun 2018 senilai Rp.24.401.144.000,00, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal senilai Rp.1.031.000.000,00.

Keterangan aset yang (baik, cukup, kurang)

Rencana dan realisasi APBD untuk Peningkatan Sarana Prasarana (Belanja Modal)

Rencana dan realisasi APBD untuk Pemeliharaan Sarana Prasarana

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. VISI DAN MISI**

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

- Misi Pertama : **Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**
- Misi Kedua : **Percepatan Pembangunan Infrastruktur**
- Misi Ketiga : **Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**
- Misi Keempat : **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**
- Misi Kelima : **Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi**
- Misi Keenam : **Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**
- Misi Ketujuh : **Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam**
- Misi Kedelapan : **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Dari Visi dan Misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sekurang-kurangnya berhubungan dengan visi “**Kalteng Maju dan Mandiri**” dan Misi ke-5 yaitu “**Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi**”, maka Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas ” Terwujudnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terwujudnya koordinasi-koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi, dan monitoring, bidang Kesra dan Kemasyarakatan untuk mencapai pembangunan Kalimantan Tengah yang sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat.

## **B. VISI DAN MISI BIRO KESRA**

### **a. Visi**

Visi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah " Terwujudnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, terwujudnya koordinasi-koordinasi, Fasilitas, Evaluasi, dan monitoring, bidang Kesra dan Kemasyarakatan untuk mencapai pembangunan Kalimantan Tengah yang sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat.

### **b. Misi :**

1. Mewujudkan terciptanya kualitas pendidikan, kesehatan, agama dan mental spiritual manusia.
2. Meningkatnya perlindungan sosial dan kemasyarakatan
3. Meningkatkan kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan transmigrasi.
4. Meningkatnya pelestarian budaya, pariwisata, dan pembinaan pemuda dan olahraga.
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak.
6. Menyelenggarakan program-program khusus masalah-masalah kesra dan sosial.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **a. Tujuan**

1. Meningkatnya pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata, Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Meningkatnya penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan tugas Bina Keagamaan, Bina Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, Kebudayaan dan Pariwisata, Bina Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Meningkatnya penyusunan bahan penyelenggara system informasi bidang kesejahteraan;
4. Meningkatnya pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**b. Sasaran**

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan menjabarkan sasaran – sasaran yang akan dicapai secara tahunan periode renstra. Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis.

**Tabel 4.2.2**  
**Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan**  
**Renstra Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 :      Meningkatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan				
1	Meningkatnya pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Bina Keagamaan	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Keagamaan	Penyusunan Rencana Kerja	Meningkatnya Pelayanan Embarkasi haji Antara
				Fasilitasi Bidang Keagamaan
1. MISI 2 :      Meningkatkan Pembinaan Kesra dan kemasyarakatan				
1	Meningkatnya Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Kesra	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Kesra	Terciptanya Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Bidang Kesra	Koordinasi Ke Pmerintah Pusat
				Koordinasi Ke Daerah Kab/Kota
MISI 3: Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra				
1	Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra	Meningkatkan kerjasama Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesra	Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan
				Monitoring ke Kab/Kota

**BAB III****KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****A. Target dan Realisasi Belanja**

Untuk Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Pagu Indikatif sebesar Rp. 27.250.000.000,00 yaitu terdiri dari Anggaran Belanja Langsung Melalui Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah diusulkan 6 Program dan 27 kegiatan.

**a. Belanja Langsung****1) Urusan Biro Kesra**

Belanja Langsung Urusan Biro Kesra sebesar Rp. 27.250.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.817.856.000,00 Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 24.401.144.000.00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.031.000.000,00

Adapun rincian target dan realisasi belanja daerah berdasarkan program/kegiatan, adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Belanja Langsung			
		PAGU BL	REALISASI		
		Rp.	KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
<b>4.06-1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.411.127.450</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.997.000	100,00	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.035.000.000	1.007.544.300	97,35	100,00
28	Penyediaan jasa komunikasi internet	91.000.000	90.869.000	99,86	100,00
43	Penyediaan jasa administrasi keuangan	979.898.950	960.873.950	98,06	100,00

56	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.028.500	27.837.500	99,32	100,00
72	Penyediaan Sistem Informasi Bidang Kesra dan Kemasyarakatan	190.200.000	190.200.000	100,00	100,00
<b>4.06-5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>412.887.550</b>			
18	Monitoring dan evaluasi Bidang Kesra	362.887.550	362.887.550	100,00	100,00
19	Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan	50.000.000	49.894.000	99,79	100,00
<b>4.06-6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.500.000,00</b>			
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.500.000,00	4.500.000	100,00	100,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.500.000,00	4.500.000	100,00	100,00
6	Penyusunan RKA-SKPD	7.000.000,00	7.000.000	100,00	100,00
14	Penyusunan LAKIP	4.500.000,00	4.500.000	100,00	100,00
<b>4.06-32</b>	<b>Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan</b>	<b>19.613.585.000</b>			
2	Pembinaan Pondok dan Pesantren Madrasah	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
8	Peningkatan Pelayanan Embarkasi haji Antara	2.100.000.000	2.076.153.600	98,86	100,00
16	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	13.980.585.000	13.533.128.590	96,80	100,00
17	Pengadaan Alat Habsyi (Tarbang)	1.413.000.000	1.356.585.000	96,01	100,00
18	Pembinaan mental kepribadian anak	95.000.000	94.165.928	99,12	100,00
19	Pembinaan pemuda/remaja antar agama	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00
20	Penyelenggaraan KKR anak sekolah minggu	1.300.000.000	1.299.274.000	99,94	100,00
22	Pengadaan Buku Kitab Suci	75.000.000	74.716.000	99,62	100,00
23	Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pemberian Dana Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00	100,00
24	Sosialisasi Bantuan Dana Hibah dan Bansos se Kalteng	200.000.000	200.000.000	100,00	100,00



<b>4.06-71</b>	<b>Program Pembinaan Kesehatan</b>	<b>3.731.142.888</b>			
1	Pelatihan Pelayanan Kesehatan PMI	350.000.000	349.501.824	99,86	100,00
2	Pengadaan barang/Jasa Klinik NU Palangka Raya	439.242.888	439.242.888	100,00	100,00
3	Pengadaan barang/Jasa Klinik Pratama IAIN dan Klinik Aisyiyah	2.941.900.000	2.511.091.064	85,36	100,00
<b>4.06-33</b>	<b>Program Pembinaan Kesra dan Kemasyarakatan</b>	<b>1.060.757.112</b>			
1	Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitas Bidang Kesra	760.757.112	759.631.141	99,85	100,00
8	Peningkatan Peranan Perempuan Pada Lembaga Pemerintah	300.000.000	288.038.850	96,01	100,00
		<b>27.250.000.000</b>	<b>26.229.132.185</b>	<b>96,25</b>	<b>100,00</b>

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### A. Urusan Wajib Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

Urusan Wajib diselenggarakan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Program Pokok dan kegiatan utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesra  
pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

#### A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Terlaksana dan Terkoordinasinya pelayanan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah			
1		Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang kesra dan kemasyarakatan Luar daerah	40	OT
2		Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang kesra dan kemasyarakatan Dalam daerah.	45	OT
3		Jumlah terkirimnya surat – surat dinas pelaksanaan tugas	1500	Surat
B	Terlaksana dan Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan			
1		Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pondok dan Pesantren Madrasah	250	Orang
2		Persentase Peningkatan Pelayanan Embarkasi Haji Antara	100	%

3		Persentase Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	100	%
4		Jumlah Pengadaan Peralatan Habsyi (Tarbang)	75	SET
5		Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental Kepribadian Anak	100	Orang
6		Jumlah yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pemuda/Remaja antar Agama	200	Orang
7		Jumlah yang mengikuti kegiatan KKR Anak Sekolah Minggu	100	Orang
9		Jumlah pengadaan buku Kitab Suci	646	bUKU
C	Tersusunnya kebutuhan sistem informasi biro administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan			
1		Jumlah Laporan Keuangan	1	Dokumen
2		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen
3		Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	1	Dokumen
4		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1	Dokumen
D	Terlayannya kebutuhan administrasi perkantoran serta meningkatnya pengetahuan dan pelayanan aparatur			
1		Persentase jasa administrasi keuangan	100	Persen
2		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20	Unit

3		Jumlah ketersediaan kebutuhan alat tulis kantor	47	Macam
4		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1565	Buah
5		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6	Unit
6		Jumlah penyediaan jasa komunikasi internet	12	Bulan
E	Terlaksananya kegiatan monitoring di 14 Kabupaten /Kota			
1		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Program Bidang Kesra	100	OT
2		Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan	15	OT

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

##### **1. Dasar Hukum**

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Program dan kegiatan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan tidak ada bantuan dari pusat atau Kementerian.

##### **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

##### **3. SKPD yang melaksanakan**

##### **4. Program dan Kegiatan**

#### **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

#### **C. DANA DEKONSENTRASI**

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

1. Daerah yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

#### **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama

#### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

#### **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

#### **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi

#### **F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

#### **G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
6. Sumber dan Jumlah Anggaran

**BAB VII**  
**P E N U T U P**

Penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah akhir tahun anggaran 2018 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

**Palangka Raya,      Februari 2019**

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN  
RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**H. SYAHRUDIN, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601223 198503 1 011



LAMPIRAN 1.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN ANGGARAN 2018

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

SKPD PENANGGUNG JAWAB : BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

URUSAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Program Nasional yang di laksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD di bagi Jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 0 Program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	0 Program X 100 % = 0.00% 0 Program
2.	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada 15 SOP	Ada SOP
3.	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 Perda	0 Perda X 100 % = 0.00% 0 Perda
4.	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 13 Jabatan	13 Jabatan X 100 % = 100.00% 13 Jabatan
5.	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada jabatan fungsional : 1 Orang	ada
6.	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD	PNS SKPD , sebanyak 33 personil	ada
7.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 13 org - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	13 Pejabat X 100 % = 100.00% 13 Pejabat
8.	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt	13 Jabatan Struktural X 100 % = 100.00% 13 Jabatan Struktural
9.	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPOD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada. Dokumen yang ada tahun 2018 sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - RENSTRA SKPOD - RENJA SKPD - RKA SKPD - DPA SKPD	4 Jenis Dokumen

10.	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program	<div>6 Program X 100 % = 100.00%</div> <div>6 Program</div>
11.	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program	<div>6 Program X 100 % = 100.00%</div> <div>6 Program</div>
12.	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program	<div>6 Program X 100 % = 100.00%</div> <div>6 Program</div>
13.	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD	Total Anggaran SKPD, sebesar Rp.27.250.000.000	
14.	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.031.000.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.27.250.000.000	<div>1,031,000,000 X 100 % = 3.78</div> <div>27,250,000,000</div>
15.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -  Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 24.401.144.000	<div>- X 100 % = 0.00</div> <div>24,401,144,000</div>
16.	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.163.799.025	<div>- X 100 % = 0.00</div> <div>27,250,000,000</div>
17.	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 6 jenis, sbb: Neraca LRA CALK Neraca Aset Neraca lajur Jurnal Bulanan	6 Jenis
18.	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, Jenis dokumennya :	Ada
19.	Nilai yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD		ada

20.	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Ada, Jenis dokumennya :	tidak ada
21.	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Tidak ada Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	tidak ada